Vol.22.1. Januari (2018): 747-774

DOI: https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p27

Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Organisasi Pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Komang Ayu Tri Wintari¹ Ketut Alit Suardana²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia e-mail: triwintarii@gmail.com/Telp: +6281916405965

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Pada era otonomi daerah saat ini, transparansi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah menjadi sangat penting. Masyarakat berharap bahwa otonomi daerah menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat, serta membudayakan dan menciptakan ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh tekanan eksternal, pengendalian internal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen organisasi pada pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penggunaan survey kuesioner. Kuesioner diserahkan ke unit kerja aparat (OPD) di Kota Denpasar. Pengumpulan sampel dengan menggunakan Purposive sampling. Jumlah responden yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner sebanyak 90 responden. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal, pengendalian internal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen organisasi berpengaruh positif yang signifikan pada transparansi pelaporan keuangan.

Kata kunci: Tekanan eksternal, pengendalian internal, ketidakpastian lingkungan, komitmen organisasi, transparansi pelaporan keuangan.

ABSTRACT

In the current era of regional autonomy, transparency regarding government financial management is essential. The community hopes that regional autonomy creates the efficiency and effectiveness of local resource management, and creates space for the people to participate in the development process. This study aims to obtain empirical evidence about the influence of external pressure, internal control, environmental uncertainty and organizational commitment on the implementation of transparency of financial reporting Organization of Regional Devices. Data collection method in this research is the use of questionnaire survey. Sample collection using Purposive sampling. The number of respondents who participated in the filling questionnaire were 90 respondents. The collected data is processed by using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that external pressure, internal control, environmental uncertainty and organizational commitment have a significant positive effect on the transparency of financial reporting.

Keywords: External pressure, internal control, environmental uncertainty, organizational commitment, transparency of financial reporting.

PENDAHULUAN

Tujuan utama adanya otonomi daerah adalah untuk tercapainya *Good Government Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, dan salah satu upaya untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) adalah dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara (Mahendra, 2013). Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah berusaha untuk membudayakan transparansi di daerahnya dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur khusus mengenai transparansi. Beberapa daerah telah menerbitkan Perda terkait transparansi dan partisipasi masyarakat sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terbit. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah sangat menyadari akan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Transparansi pada hakekatnya dapat memberikan dampak yang positif pada organisasi secara khusus dan daerah secara umum.

Kebanyakan perda transparansi yang ada tidak memiliki sanksi, sehingga sulit dalam pelaksanaan dan penegakkannya. Oleh karena itu, butuh komitmen yang tinggi oleh segenap jajaran pemerintah daerah untuk menerapkan transparansi pengukuran dan kontrol yang lemah atau tidak tepat, yaitu akuntabilitas rendah (Frumkin dan Galaskiewicz, 2004). Rendahnya akuntabilitas yang ada menggambarkan rendahnya keinginan organisasi publik dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan. Tidak adanya transparansi publik akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas dan dapat merugikan masyarakat. Dampak negatif yang akan timbul dikarenakan tidak adanya transparansi adalah dapat menimbulkan distorsi dalam alokasi sumber daya, memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat, menyuburkan praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Pada tahun 2017, Kota Denpasar dihebohkan oleh insiden meninggalnya

seorang anak bernama Rendi Rizaldi (13 Tahun) karena tersetrum saat hendak

minum air dari keran air siap minum atau mesin Air Minum Otomatis (AMO) di

Lapangan Puputan Denpasar, alat AMO tersebut ternyata sudah mengalami

kerusakan sejak beberapa hari sebelumnya. Namun dari pihak pengelola belum

ada perbaikan hingga kasus ini terjadi. Kejadian ini sangat memprihatinkan,

bawasannya alat AMO yang merupakan fasilitas publik tidak dirawat dengan

maksimal sehingga menimbulkan insiden seperti ini.

Kejadian tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan seberapa besar dana

yang dianggarkan Pemerintah Kota Denpasar terkait pengadaan serta perawatan

alat AMO yang ada di Lapangan Puputan Denpasar tersebut? Karena dengan

melihat anggaran ini kita dapat menilai seberapa besar keseriusan Pemerintah

dalam memberikan fasilitas publik. Dari segi kualitas alat sampai perawatan yang

intensif dan menyeluruh mesti dilakukan dengan maksimal oleh Pemerintah Kota

Denpasar. Sehingga fasilitas publik ramah terhadap publik, bukan sebaliknya

malah menimbulkan korban. Dimana hal ini akan berpengaruh pada kepercayaan

publik terhadap fasilitas publik yang disediakan.

Pemerintah Kota Denpasar yang dikategorikan sebagai badan publik sesuai

amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik berkewajiban untuk mengumumkan Informasi

Publik berkala. **Publik** didorong secara Badan untuk mewujudkan

penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien,

akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tidak ditemukannya

transparansi proyek pengadaan alat AMO, maka disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar belum mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik sesuai amanat undang-undang yang ada, dikutip dari *puputanblog.wordpress.com*.

Penerapan transparansi di organisasi sektor publik diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal (masyarakat). Kemudahan mengakses informasi yang dimiliki oleh pemerintah merupakan satu hal yang menjadi perhatian bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya keterkaitan antara isu-isu mengenai etika, korupsi, dan penyimpangan administrasi dan akuntabilitas (Piotrowski dan Bertelli, 2010). (Silver, 2005) mengatakan bahwa para pemangku kepentingan (stakeholders) menuntut organisasi untuk lebih transparan. Transparansi merupakan sebuah konsep mencakup peristiwa atau kejadian (informasi yang terbuka tentang *input, output, dan outcome*), transparansi proses (informasi yang terbuka tentang transformasi yang berlangsung antara *input, output*, dan *outcome*), transparansi *real-time* (informasi yang dirilis segera), atau transparansi retrospektif (Hood, 2007).

Tekanan Eksternal adalah tekanan yang berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah seperti peraturan (regulasi), eksekutif, masyarakat, dan sebagainya. Adanya tekanan eksternal dapat berakibat pada praktik-praktik Organisasi Perangkat Daerah yang hanya bersifat formalitas untuk memperoleh legitimasi. Praktik- praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan (Ridha dan Basuki 2012).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh tekanan eksternal terhadap

transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh (Ridha dan Basuki, 2012),

(Sihaoloho et al, 2013) dan (Hastuti, 2015) menunjukkan bahwa tekanan

eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan

keuangan, berupa peraturan dan kebijakan yang menjadi pemicu diterapkannya

transparansi pelaporan keuangan. (Julita dan Belian, 2015) dan (Dewi et al. 2015)

meneliti variabel yang sama dengan hasil tekanan eksternal tidak berpengaruh

terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh

eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain

untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan yang

terdiri atas keandalan laporan keuangan dimana pengendalian internal ditujukan

untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan harus disajikan

secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia, kepatuhan terhadap

hukum, dan peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi. Hasil

penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap

transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh (Sari, 2012), (Amelia,

2015), (Alim, 2015), (Hastuti, 2015) menunjukkan bahwa pengendalian Internal

berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Ketidakpastian lingkungan adalah kondisi dimana Organisasi Perangkat

daerah (OPD) mengalami ketidakpastian yang dapat disebabkan adanya pengaruh

dari luar OPD, seperti sering terjadinya perubahan peraturan, tidak padunya antara

peraturan yang satu dengan yang lain, terjadinya mutasi staf OPD yang cepat,

dan lain sebagainya. OPD dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, baik dalam praktik maupun operasionalnya. Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan (Ridha dan Basuki 2012).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh (Ridha dan Basuki, 2012), (Sihaloho, 2013), dan (Hastuti, 2015) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. (Fardian, 2014), (Julita dan Belian, 2015), dan (Satyaningsih et al, 2014) melaksanakan penelitian dengan variabel yang sama menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transapransi pelaporan keuangan.

Komitmen organisasi sendiri terkait dengan profesionalisme. Perubahan komitmen dapat berdampak pada masalah karakter dan integritas organisasi (Dacin *et al*, 2002). (Paine, 1994) menyatakan bahwa strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut daripada inisiatif kepatuhan atas hukum. Kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen organisasi yang kuat. Institusionalisasi sebagai proses dalam organisasi untuk menetapkan suatu karakter ditentukan oleh komitmen organisasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip (Dacin *et al*, 2002). Transparansi merupakan salah satu nilai atau prinsip (PP No.58 Tahun 2005, Penjelasan Pasal 4 ayat 1) yang harus dipegang oleh organisasi dalam pengelolaan keuangannya (Ridha dan Basuki, 2012).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh komitmen organisasi

terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh (Ridha dan

Basuki, 2012), (Hastuti, 2015), dan (Dewi et al, 2015) menunjukkan bahwa

komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi

pelaporan keuangan. Penelitian yang sama juga dilaksanakan oleh (Julita dan

Belian, 2015) dan (Purnamasari, 2015) dengan variabel yang sama menunjukkan

bahwa Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi

pelaporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh (Ridha

dan Basuki, 2012) yang berjudul "Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian

Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi

Pelaporan Keuangan." Penelitian ini belum banyak dilaksanakan di daerah lain.

Beberapa penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti lain, seperti (Fardian, 2014)

di OPD Pemerintah Kota Padang, dan (Julita dan Belian, 2015) di Pemerintah

Kota Pekanbaru menunjukkan hasil yang berbeda.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, lokasi

penelitian, periode penelitian, dan variabel penelitian. Lokasi yang digunakan

oleh peneliti yaitu Kota Denpasar, alasan memilih Kota Denpasar dengan terjadi

kasus di Kota Denpasar tentang tidak ditemukannya transparansi dana yang

dianggarkan Pemerintah Kota Denpasar terkait pengadaan alat AMO, maka dari

itu peneliti memilih Kota Denpasar sebagai tempat penelitian. Pada penelitian ini,

peneliti menambahkan satu variabel, yaitu Pengendalian Internal.

Alasan peneliti menambahkan variabel pengendalian internal karena dalam pemerintahan pengendalian internal menjadi bagian penting dalam organisasi. Pengendalian internal digunakan untuk menjalankan proses eksekusi oleh pihak kepala daerah/dinas maupun anggota guna pencapaian tujuan dalam organisasi. Semakin sistem pengendalian internal diterapkan dengan baik di dalam pemerintahan, maka pengungkapan proses transparansi pelaporan keuangan akan menjadi lebih transparan. Karena dengan sistem pengendalian internal, organisasi dapat mengarahkan, mengawasi serta dapat mengukur sumber daya yang ada di dalam organisasi. Begitu juga sebaliknya jika dalam organisasi pemerintah tidak diterapkan pengendalian internal secara baik maka tujuan dan proses eksekusi yang ada tidak berjalan dengan baik.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh tekanan eksternal pada transparansi pelaporan keuangan; 2) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pengendalian internal pada transparansi pelaporan keuangan; 3) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh ketidakpastian lingkungan pada transparansi pelaporan keuangan; 4) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh komitmen organisasi pada transparansi pelaporan keuangan.

Bagi akademisi, penelitian ini menambah wawasan tentang pengukuran tingkat transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan faktor apa sajakah yang mempengaruhinya. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pertanggung jawaban pemerintah akan kerja dan kinerja untuk amanah yang diberikan oleh masyarakat dalam memberikan transparansi

pelaporan keuangan pemerintah daerah yang nantinya menjadi sarana informasi

bagi pihak eksternal. Dan menjadi acuan pemerintah daerah sebagai bahan

evaluasi dan pengambilan keputusan untuk kebijakan selanjutnya. Bagi

masyarakat, penelitian ini sebagai sarana informasi tentang situasi dan kinerja

pemerintah daerah dalam menjalankan amanah dan tanggung jawabnya

berdasarkan transparansi baik dalam segi administratif maupun finansial yang

bersifat laporan keuangan yang di laporkan secara transparan.

(Scott, 2013) menjelaskan bahwa teori institusional digunakan untuk

menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Teori

institusional telah muncul menjadi terkenal sebagai penjelas yang kuat dan

populer, baik untuk tindakan-tindakan individu maupun organisasi yang

disebabkan oleh faktor eksogen (Dacin et al., 2002), faktor eksternal (Frumkin

dan Galaskiewicz, 2004) faktor social, faktor ekspektasi masyarakat, faktor

lingkungan (Ashworth et al, 2009). Teori institusional berpendapat bahwa

organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk

berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau harapan sosial

(DiMaggio dan Powell, 1983; Frumkin dan Galaskiewicz, 2004, Ashworth et al,

2009) dimana organisasi berada.

Penyesuaian pada harapan eksternal atau harapan sosial mengakibatkan

timbulnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan internal mereka

dan berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal (Meyer dan

Rowan, 1977). Organisasi publik yang cenderung untuk memperoleh legitimasi

akan cenderung memiliki kesamaan atau isomorfisme (*isomophism*) dengan organisasi publik lain (DiMaggio dan Powell, 1983).

(DiMaggio dan Powell, 1983) menyatakan bahwa isomorfisme (isomorphism) adalah proses yang mendorong satu unit dalam suatu populasi untuk menyerupai unit yang lain dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama. Penelitian terbaru telah menekankan bagaimana organisasi publik menjadi subjek tekanan institusional yang mendalam sehingga menyebabkan pada umumnya organisasi publik menjadi lebih mirip (Ashworth et al, 2009). Teori institusional organisasi memprediksi bahwa organisasi akan menjadi lebih serupa karena tekanan institusional, baik dikarenakan adanya koersif (coercive), normatif (normative), dan mimetik (mimetic) (DiMaggio dan Powell, 1983).

(Aryansyah, 2012) menjelaskan bahwa teori agensi adalah hubungan antara prinsipal dan agen. Hubungan keagenan sektor pemerintah tidak dapat didekati sepenuhnya dengan pendekatan keagenan konvensional, karena adanya perbedaan ideologi organisasi yang ada, ideologi organisasi yang ada di sektor publik (pemerintahan) adalah organisasi yang lebih mengkedepankan kepentingan publik atau memaksimalkan kepentingan sosial. Dalam memaksimalkan pelayanan masyarakat (public service) di atas kepentingan lainya. Sementara itu ideologi yang tekandung dalam teori keagenan sendiri berdasarkan fakta yang ada dan terjadi terdapat unsur kapitalisme yang seiring melekat erat pada teori ini dimana paradigma yang terjadi dalam penelitian akuntansi sikap individualis yang menepatkan self-interest sebagai sesuatu yang lebih dominan.

(Hilmi dan Martani, 2012) mengungkapkan agency problem juga ada dalam

konteks organisasi pemerintahan. Prinsipal dalam sektor publik memiliki latar

belakang yang berbeda-beda, oleh karena itu seharusnya pengungkapan laporan

keuangan tidak hanya terbatas pada akses dan dilaporkan kepada DPRD yang

berperan sebagai wakil rakyat. Hubungan prinsipal dan agen dapat dilihat dalam

politik demokrasi. Dikarenakan Indonesia adalah sebagai Negara kesatuan dan

demokrasi, maka pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap prinsipal yaitu

masyarakat sebagai pemilih dan pemerintah pusat.

Tekanan eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor luar

organisasi yang dapat berpengaruh terhadap organisasi baik berpengaruh terhadap

struktur maupun kegiatannya. Merujuk pada proses dimana organisasi

mengadopsi fitur (sifat) tertentu karena paksaan (tekanan) dari negara, organisasi

lain, atau masyarakat. Bentuk tekanan misalnya: regulasi atau kontrak. Paksaan

yang muncul tidak selalu formal dan paksaan yang dilakukan bisa menimbulkan

ketaatan yang sesungguhnya atau yang semu (sekedar supaya kelihatan patuh).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh tekanan eksternal terhadap

transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh (Ridha dan Basuki, 2012),

(Sihaoloho, 2013), dan (Hastuti, 2015) menunjukkan bahwa tekanan eksternal

berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, berupa

peraturan yang menjadi pemicu diterapkannya transparansi pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di duga

bahwa penerapan transparansi peloparan keuangan di pengaruhi oleh tekanan

eksternal. Untuk itu, dapat dirumuskan hipotesis satu sebagai berikut:

H₁: Tekanan eksternal berpengaruh positifif signifikan pada transparansi pelaporan keuangan.

(Sukmaningrum, 2012) menjelaskan bahwa interaksi antara orang dan sistem serta implementasi sistem merupakan faktor penting yang memengaruhi kualitas dari sebuah informasi, dimana keandalan sistem harus juga didukung oleh keandalan sumber daya manusia. Namun sistem yang sudah berjalan harus dikontrol agar tetap dapat berjalan baik. (Amelia, 2015) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri atas keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi.

Sistem pengendalian internal bukan hal baru dalam pemerintahan dimana dalam pemerintahan pengendalian internal menjadi bagian penting dalam organisasi. Pengendalian internal digunakan untuk menjalankan proses eksekusi oleh pihak kepala daerah/dinas maupun anggota guna pencapaian tujuan dalam organisasi. Semakin sistem pengendalian internal diterapkan dengan baik di dalam pemerintahan, maka pengungkapan proses transparasi pelaporan keuangan akan menjadi lebih transparan. Karena dengan sistem pengendalian internal, organisasi dapat mengarahkan, mengawasi serta dapat mengukur sumber daya yang ada di dalam organisasi. Begitu juga sebaliknya jika dalam organisasi pemerintah tidak di terapkan pengendalian internal secara baik maka tujuan dan proses eksekusi yang ada tidak berjalan dengan baik.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh Pengendalian Internal

terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh (Sari, 2012),

(Amelia, 2015), (Alim, 2015), (Hastuti, 2015) menunjukkan bahwa Pengendalian

Internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan,

berupa sistem untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan

efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku sehingga menjadi pemicu

diterapkannya transparansi pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas dan

hasil penelitian sebelumnya dapat diduga bahwa penerapan transparansi pelaporan

keuangan di pengaruhi oleh pengendalian internal. Untuk itu, dapat dirumuskan

hipotesis dua sebagai berikut:

H₂: Pengendalian internal berpengaruh positif signifikan pada transparansi

pelaporan keuangan.

Isomorfisme mimetik adalah kecenderungan organisasi untuk memodelkan

dirinya pada perilaku organisasi lain (DiMaggio dan Powell, 1983) muncul

sebagai tanggapan untuk suatu ketidakpastian akan suatu standar tertentu

(Mizruchi dan Fein, 1999). Ketidakpastian lingkungan sering terjadi dalam setiap

organisasi. Ketidakpastian lingkungan bisa disebabkan oleh berbagai hal dari luar

organisasi. Seperti perubahan kebijakan kebijakan dan peraturan yang tidak

menentu dalam setiap waktu dan perbedaan peraturan yang ada akibat suatu

dugaan lainnya. Menurut (Milliken, 1987) ketidakpastian lingkungan adalah rasa

ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi sesuatu secara akurat dari seluruh

faktor sosial dan fisik yang secara langsung mempengaruhi perilaku pembuatan

keputusan orang-orang dalam organisasi. Menurut (Luthans, 1998) ketidakpastian

lingkungan adalah situasi seseorang yang terkendala untuk memprediksi situasi di sekitarnya sehingga mencoba untuk melakukan sesuatu untuk menghadapi ketidakpastian tersebut.

(Fisher, 1996) menyebutkan bahwa pada kondisi ketidakpastian tinggi, individu sulit untuk memprediksi kegagalan dan keberhasilan dari keputusan yang dibuatnya. Sehingga membuat organisasi merubah proses dan struktur tertentu yang telah ada untuk menyesuaikan dengan keadaan. Adanya penerapan perubahan dalam penyesuaian keadaan baik proses, struktur tatanan ataupun sistem yang digunakan dalam organisasi mengakibatkan pemahaman individu akan organisasi yang kurang, khususnya dalam penerapan hal hal baru. Disebabkan ketidaksiapan organisasi dalam bertransformasi ke hal yang baru.

Transparansi pelaporan keuangan mengharuskan organisasi untuk menyajikan laporan keuangan yang bebas dari salah material dan informasi yang bias kepada pihak luar (Ridha dan Basuki, 2012). Menurut (Ridha dan Basuki, 2012) keterandalan dalam transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian lingkungan dari jenis jenis yang diakui dan diukur dalam laporan keuangan. Dengan adanya peraturan pemerintah terkait penerapan transparansi pelaporan keuangan akan mendorong organisasi untuk menyampaikan informasi secara detil baik proses ataupun praktik yang ada dalam laporan keuangan untuk memenuhi prasyarat kualitas keandalan.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh (Fardian, 2014), (Julita dan Belian, 2015), dan (Satyaningsih *et al*, 2014) menunjukkan bahwa

ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi

pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya,

peneliti akan meneliti apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap

penerapan transparansi pelaporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut dapat

hipotesis tiga sebagai berikut:

Ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif signifikan pada transparansi H₃:

pelaporan keuangan.

Menurut (Nadirsyah, 2008), komitmen organisasi adalah suatu keyakinan

dan dukungan yang kuat dari organisasi untuk melakukan, menjalankan, dan

mengimplementasikan suatu kebijakan yang ditetapkan secara bersama sehingga

tujuan atas diterapkannya kebijakan tersebut dapat dicapai. Pejabat pimpinan yang

bertanggung jawab atas jalannya organisasi dalam melaksanakan perencanaan,

pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi sehingga

orang bekerjasama dengan efektif untuk mencapai sasaran organisasi (Saputra,

2015). Dengan mencapai sasaran organisasi yang efektif, transparansi dapat

diterapkan seiring dengan jalannya organisasi yang baik.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh komitmen organisasi

terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh (Ridha dan

Basuki, 2012), (Hastuti, 2015), (Dewi et al, 2015), (Prasetya, 2015), (Saputra,

2015) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap

penerapan transparansi pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka

dapat dirumuskan hipotesis empat sebagai berikut:

 H_4 : Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan pada transparansi

pelaporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data dalam bentuk angka-angka dan dapat dihitung dengan satuan hitung (Sugiyono, 2014:14). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa hasil pengisian kuesioner. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul, meliputi hasil kuesioner. Penelitian ini dalam pengolahan data menggunakan data primer dengan mengedarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi oleh responden. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah jawaban responden terhadap kuesioner.

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas atau independen (Sugiyono, 2014:59). Variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah Transparansi Pelaporan Keuangan. Variabel Bebas atau variabel independen adalah suatu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat atau dependen (Sugiyono, 2014:59). Variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini adalah Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Organisasi.

(Sugiyono, 2014:115) mendefinisikan populasi sebagai sebuah wilayah umum yang menjadi fokus penelitian, yang di dalamnya mengandung unsur objek/subjek, serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di seluruh OPD Kota Denpasar, yaitu sebanyak 30 OPD yang terdiri atas 20 Dinas, 6 Badan dan 4 Kantor. Populasi dalam penelitian ini adalah

pegawai OPD Kota Denpasar. Responden dalam penelitian ini yaitu masing-masing OPD sebanyak 3 orang.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2014:116). Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala OPD, Kepala Bagian Keuangan dan Pengelola Laporan Keuangan di OPD. Serta telah menjabat minimal 1 (satu) tahun atau lebih di OPD, dengan pandangan bahwa responden telah memahami situasi dan kondisi di dalam OPD serta terlibat dalam pelaporan dan pengambilan keputusan khususnya dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan memberikan kuisioner kepada responden. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden yang ada untuk dijawab. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e...$$
 (1)

Keterangan

Y = Transparansi laporan keuangan

 $\alpha = Konstana$

 $\begin{array}{ll} \beta_1\text{-}\beta_4 &= Koefisien\ Regresi \\ X_1 &= Tekanan\ Internal \\ X_2 &= Pengendalian\ internal \\ X_3 &= Ketidak pastian\ lingkungan \\ X_4 &= Komitmen\ organisasi \end{array}$

= Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian validitas setiap butir digunakan analisis item, yang mengkorelasikan skor setiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah setiap skor butir. Menurut (Sugiyono, 2014:109) bahwa suatu instrumen dikatakan valid apabila koefisien korelasi antar butir pertanyaan > 0,361. Semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien korelasi berada di atas 0,361, sehingga layak dijadikan instrumen penelitian.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabal	Item -	Reliabilitas		
Variabel		Alpha Cronbach	Standar	Keterangan
Tekanan Eksternal	X_1	0,781	0,6	Reliabel
Pengendalian Internal	X_2	0,651	0,6	Reliabel
Ketidakpastian Lingkungan	X_3	0,610	0,6	Reliabel
Komitmen Organisasi	X_4	0,604	0,6	Reliabel
Transparansi Pelaporan Keuangan	Y	0,650	0,6	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2017

(Husein, 2011:207) menyatakan bahwa nilai suatu instrumen dikatakan reliabel bila nilai Cronbach's Alpha ≥ 0,60. Berdasarkan Tabel 1, semua variabel memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach berada di atas 0,6 sehingga semua instrumen tersebut adalah reliabel, sehingga layak dijadikan instrumen penelitian.

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,459. Karena Asymp. Sig (p-value) 0,459 lebih besar daripada α (0,05) maka dapat diinterpretasikan bahwa residual dari model telah berdistribusi normal.

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tolerance variabel bebas tidak ada yang kurang dari 10 persen (0,1) dan seluruh variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa pada data penelitian ini, tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi ini.

Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruh variabel bebas $(X_1, X_2, X_3, dan X_4)$ terhadap absolute residual (abs_res), baik secara serempak maupun parsial karena nilai Sig. lebih besar dari 0,05. Dengan demikian model yang dibuat tidak mengandung gejala heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk memprediksi. Berdasarkan hasil uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi yang digunakan telah lolos uji asumsi klasik.

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data digunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui dan menunjukkan arah serta besarnya pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Organisasi pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardiz	zed Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	В	Std. Error	Beta		
(Constant)	-0,103	1,001		-0,103	0,919
TE	0,132	0,060	0,174	2,201	0,030
1 PI	0,279	0,091	0,244	3,060	0,003
KL	0,360	0,097	0,308	3,720	0,000
KO	0,312	0,085	0,281	3,668	0,000
F hitung	: 96,3	302			
Signifikansi F	: 0,00	00			
R Square	: 0,8	19			
Adjusted R Square	: 0,8	11			

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan model yang telah dianalisis, dilakukan pengujian secara bersamasama dengan uji F (F-*test*), berdasarkan Tabel 2. dapat diketahui F_{hitung} sebesar 96,302, signifikansi (*p-value*) sebesar 0,000 dan *Adjusted R Square* sebesar 0,811 atau 81,1%. Berdasarkan nilai toleransi yang diberikan yaitu $\alpha = 5$ persen dengan nilai signifikansi 0,000 < α (0,05) maka H_o ditolak dan H_i diterima.

Ini berarti bahwa variabel Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Secara bersamasama, Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Organisasi berpengaruh sebesar 0,811 atau 81,1%, sedangkan sisanya sebesar 19,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 2. diperoleh bahwa Tekanan Eksternal secara parsial berpengaruh signifikan pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Ini ditunjukan oleh koefisien variabel Tekanan Eksternal sebesar 0,132 yang signifikan dengan nilai t-hitung sebesar 2,201 pada p sebesar 0,030. Koefisien Tekanan Eksternal yang sudah distandarisasi ditunjukan dengan nilai beta sebesar 0,132. Hal ini berarti pengaruh langsung Tekanan Eksternal pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan adalah 13,2%.

Hal ini berarti semakin tinggi Tekanan Eksternal, maka Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan semakin baik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh positif Tekanan Eksternal pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan terbukti kebenarannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ridha dan Basuki, 2012), (Sihaoloho,

2013), dan (Hastuti, 2015) menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh

positif pada penerapan transparansi pelaporan keuangan, berupa peraturan yang

menjadi pemicu diterapkannya transparansi pelaporan keuangan. (Frumkin dan

Galaskiewicz, 2004) menyatakan bahwa tekanan eksternal dapat mempengaruhi

tingkat kemampuan pemerintahan menjadi lebih rendah, terutama yang terkait

dengan penerepan suatu kebijakan maupun prosedur. Adannya tekanan eksternal

dapat berakibat pada praktik-praktik OPD yang hanya bersifat formalitas untuk

memperoleh legitimasi. Praktik-praktik yang dimaksud dalam penelitian ini

dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Berdasarkan Tabel 2. diketahui koefisien Pengendalian Internal (b2) sebesar

0,279 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 dengan (α) = 5 persen (0,003 <

0,05). Selain itu, keputusan juga ditentukan dengan nilai $t_{hitung} = 3,060$ lebih besar

dari t_{tabel} yaitu $t_{(0.025;89)} = 1,987$ (3,060 > 1,987), maka Ho ditolak dan H₂ diterima.

Ini berarti bahwa Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh positif dan

signifikan pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Koefisien

Pengendalian Internal yang sudah distandarisasi ditunjukan dengan nilai beta

sebesar 0,244. Hal ini berarti pengaruh langsung Pengendalian Internal pada

Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan adalah 24,4%.

Hal ini berarti semakin tinggi Pengendalian Internal, maka Penerapan

Transparansi Pelaporan Keuangan semakin baik. Penelitian ini sejalan dengan

penelitian terdahulu mengenai pengaruh Pengendalian Internal pada Penerapan

Transparansi Pelaporan Keuangan yang dilakukan oleh (Amelia, 2015), (Alim,

2015), (Hastuti, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa Pengendalian Internal di OPD

Kota Denpasar berpengaruh positif pada penerapan transparansi pelaporan keuangan, berupa sistem untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku sehingga menjadi pemicu diterapkannya transparansi pelaporan keuangan.

Berdasarkan Tabel 2. diketahui koefisien Ketidakpastian Lingkungan (b3) sebesar 0,360 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dengan (α) = 5 persen (0,000 < 0,05). Selain itu, keputusan juga ditentukan dengan nilai t_{hitung} = 3,720 lebih besar dari t_{tabel} yaitu $t_{(0,025;89)}$ = 1,987 (3,720 > 1,987), maka Ho ditolak dan H₃ diterima. Ini berarti bahwa Ketidakpastian Lingkungan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Koefisien Ketidakpastian Lingkungan yang sudah distandarisasi ditunjukan dengan nilai beta sebesar 0,308. Hal ini berarti pengaruh langsung Ketidakpastian Lingkungan pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan adalah 30,8%.

Hal ini berarti semakin tinggi Ketidakpastian Lingkungan, maka Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan semakin baik. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fardian, 2014), (Julita dan Belian, 2015), dan (Satyaningsih *et al*, 2014) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif pada penerapan transparansi pelaporan keuangan. (Fisher, 1996) menyebutkan bahwa pada kondisi ketidakpastian tinggi, individu sulit untuk memprediksi kegagalan dan keberhasilan dari keputusan yang dibuatnya. Sehingga membuat organisasi merubah proses dan struktur tertentu yang telah ada

untuk menyesuaikan dengan keadaan. Adanya penerapan perubahan dalam

penyesuaian keadaan baik proses, struktur tatanan ataupun sistem yang digunakan

dalam organisasi mengakibatkan pemahaman individu akan organisasi yang

kurang, khususnya dalam penerapan hal hal baru. Disebabkan ketidaksiapan

organisasi dalam bertransformasi ke hal yang baru.

Berdasarkan Tabel 2. diketahui koefisien Komitmen Organisasi (b4) sebesar

0.312 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 dengan (α) = 5 persen (0.000 <

0,05). Selain itu, keputusan juga ditentukan dengan nilai $t_{hitung} = 3,668$ lebih besar

dari t_{tabel} yaitu $t_{(0.025;89)} = 1,987$ (3,668 > 1,987), maka Ho ditolak dan H₄ diterima.

Ini berarti bahwa Komitmen Organisasi secara parsial berpengaruh positif dan

signifikan pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Komitmen

Organisasi yang sudah distandarisasi ditunjukan dengan nilai beta sebesar 0,281.

Hal ini berarti pengaruh langsung Komitmen Organisasi pada Penerapan

Transparansi Pelaporan Keuangan adalah 28,1%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Komitmen

Organisasi, maka Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan semakin baik.

Hasil ini juga sesuai dengan penelitian (Ridha dan Basuki, 2012), (Hastuti, 2015),

(Dewi et al, 2015), (Prasetya, 2015), (Saputra, 2015) menunjukkan bahwa

komitmen organisasi berpengaruh positif pada penerapan transparansi pelaporan

keuangan. Menurut (Nadirsyah, 2008), komitmen organisasi adalah suatu

keyakinan dan dukungan yang kuat dari organisasi untuk melakukan,

menjalankan, dan mengimplementasikan suatu kebijakan yang ditetapkan secara

bersama sehingga tujuan atas diterapkannya kebijakan tersebut dapat dicapai.

Pejabat pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya organisasi dalam melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi sehingga orang bekerjasama dengan efektif untuk mencapai sasaran organisasi (Saputra, 2015). Dengan mencapai sasaran organisasi yang efektif, transparansi dapat diterapkan seiring dengan jalannya organisasi yang baik.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Tekanan eksternal berpengaruh positif signifikan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan. Semakin tinggi tekanan eksternal, maka transparansi pelaporan keuangan semakin baik; 2) Pengendalian internal mempunyai pengaruh positif signifikan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan. Semakin tinggi pengendalian internal maka penerapan transparansi pelaporan keuangan akan semakin baik; 3) Ketidakpastian lingkungan mempunyai pengaruh positif signifikan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan. Semakin tinggi ketidakpastian lingkungan maka penerapan transparansi pelaporan keuangan akan semakin baik; 4) Komitmen organisasi mempunyai pengaruh positif signifikan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan. Semakin tinggi komitmen organisasi maka penerapan transparansi pelaporan keuangan akan semakin baik; 4) maka penerapan transparansi pelaporan keuangan semakin tinggi komitmen organisasi maka penerapan transparansi pelaporan keuangan akan semakin baik.

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 1) Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar agar melaksanakan peraturan dan monitoring evaluasi lebih intensif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja masing-masing OPD dan kinerja pegawai

sebagai upaya pengendalian internal, diharapkan agar setiap OPD meningkatkan transparansi pelaporan keuangan dengan cara memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh semua kalangan pihak/masyarakat secara transparansi dan akuntabilitas sehingga kinerja pemerintah dapat diukur; 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur penelitian yang akan datang di bidang akuntansi sektor pemerintahan, dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh dan belum dimasukkan dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Alim, E. K. 2015. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Pada Pegawai Pemda Pejabat Eselon 4 yang sudah bekerja selama satu tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Skripsi Strata-1*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta
- Amelia, R. 2015. Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Tekanan Eksternal Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada OPD Kota Pekanbaru). *Jurnal Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Pekanbaru.
- Aryansyah. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi penungkapan informasi akuntansi di internet. *Skripsi-Strata-1*, Universitas Diponegoro Semarang
- Ashworth *et*, *al*.. 2009. Escape from the Iron Cage? Organizational Change and Isomorphic Pressures in the Public Sector. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Dacin et, al. 2002. Institutional Theory and Institutional Change: Introduction to the Special Research Forum. The Academy of Management Journal.
- Dewi *et. al.* 2015. Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Karangasem). *Jurnal Akuntansi Program S1: Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 1 No. 3*.
- DiMaggio, P. J. dan Walter, W. P. 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, Volume 48, Issue 2 (Apr., 1983), 174-160).
- Fardian, D. 2014. Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi

- Pelaporan Keuangan (Studi Empiris atas OPD Pemerintah Kota Padang). *ejournal.unp.ac.id.* diakses pada 25 April 2016.
- Fisher, C. 1996. The Impact of Perceived Environmental Uncertainty and Individual Differences on Management Information Requirement. *According, Organizations and Society,* Volume 21, Issue 4, May 1996, Pages 361–369.
- Frumkin, P. Dan Galaskiewichz, J. 2004. Institutional Isomorphism and Public Sector Organizations. Journal of Public Administration Research and Theory. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Hastuti, A.I. 2015. Faktor-faktor yang memengaruhi transparansi pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Boyolali. *Naskah Publikasi S1 Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Hilmi, Z, A. dan Martani, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Memperngaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah.
- Hood, C. 2007. What Happens When Transparency Meets Blame-Avoidance?. *Public Management Review*, DOI:10.1080/14719030701340275 pages 191-210.
- Husein, Umar. 2011. *Metode Pemilihan Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Julita dan Belian, E. S. 2015. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen dan Tekanan Eksternal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru. repository.unri.ac.id Diakses pada 25 April 2016.
- Luthans, F. 1998. Organisasi Behavior, Eighth Edition. McGraw-Hill *Internasional Book Company*: New York.
- Mahendra, D. 2013. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen, dan kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Skripsi* FE Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Meyer, J. W. dan Bryan Rowan. 1977. Institutionalized Organizations Formal Structure as Myth and Ceremony. *The American Journal of Sociology*, Vol. 83, No. 2 (Sep., 1977), pp. 340-363.

- Milliken, F. J. 1987. Three Types of Perceived Uncertainty about Environment: State, Effect, and Response Uncertainty. *Academy of Management Review* 12, Vol. 12, No. 1 (Jan., 1987), pp. 133-143.
- Mizruchi, M. S. dan L. C. Fein. 1999. The Social Construction of Organizational Knowledge A Study of the Uses of Coercive, Mimetic, and Normative Isomorphism. *Administrative Science Quarterly*.
- Nadirsyah. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Pada Pemerintah Aceh Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 3 No.1.
- Paine, L. S. 1994. Managing Organizational Integrity. *Harvard Business Review*, March–April 1994.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prasetya. K. A. (2015). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Skripsi Strata-1*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Purnamasari. 2015. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Tekanan Eksternal, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo). *Skripsi*: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA): Surabaya.
- Piotrowski, S. J., dan Bartelli, A. 2010. *Measuring Municipal Transparency*. 14th IRSPM Conference, Bern, Switzerland, April.
- Puputan. Insiden Alat AMO di Lapangan Puputan : Transparansi Anggaran. puputanblog.wordpress.com diunduh pada 25 April 2017
- Ridha, M. A dan Basuki, H. dan 2012. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin*.
- Sari, D. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bandung: SNAB Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis Yang Profesional
- Saputra, M. R. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

- Magelang Dan Kota Magelang). *Skripsi:* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY): Yogyakarta
- Satyaningsih et. al. 2014. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung). Jurusan Akuntansi Program S1: Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2 No. 1.
- Scott, W. Richard 2013, *Intitutions dan Organization: Ideas, Identities, and Interests*. Thousand Oaks, CA: Sage, 4th ed.
- Sihaloho *et. al.* 2013. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Publikasi* Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Silver, D. 2005. Creating Transparency for Public Companies the Convergence of PR and IR in the Post-Sarbanes-Oxley Marketplace. *Public Relations Strategist*; *Winter* 2005, Vol. 11 Issue 1, p14.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. CV.Alfabeta: Yogyakarta. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.
- Sukmaningrum, T. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Memperngaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (study empiris pada pemerintah Kota dan Kabupaten Semarang). *Jurnal Skripsi* Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.